

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil simpulan antara lain;

1. Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat adalah
 - a. Bahwa Ketua dan Sekretaris KAN Guguk VIII Koto yang menerbitkan Surat Keputusan KAN tanggal 13 Maret 1995 No.90.P/KAN-GG/1994; telah dibatalkan secara *mutatis mutandis* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
 - b. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG tersebut memerintahkan Pengurus KAN Guguk VIII Koto untuk mencabut Surat Keputusan KAN Guguk VIII Koto No.90.P/KAN-GG/1994 secara *mutatis mutandis*.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;
 - a. Bahwa SK KAN Guguk VIII Koto tanggal 13 Maret 1995 No.90.P/KAN-GG/1994 tentang penetapan Maspar Johan suku Caniago Burai Desa Tiakar tidak dapat menyandang gelar Dt.Patih

karena keturunan Dt.Patih punah, padahal kenyataannya Kaum Dt.Patih masih ada (kaum Maspar Johan).

- b. Bahwa Hakim menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.13/1983 dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No.04/Inst/GDB/1994 sebenarnya sudah merupakan putusan yang sah.
- c. Bahwa Maspar Johan sebagai Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan di depan Peradilan Tata Usaha Negara Padang yang mengakibatkan di keluarkannya Surat Keputusan KAN Guguk VIII Koto (objek sengketa) dan Surat Keputusan KAN tersebut merugikan Maspar Johan dan anggota kaum suku Caniago Burai di bawah payung DT.PATIH.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga Adat Tertinggi di Nagari di Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa adat baik sako maupun pusako berpegang kepada hukum positif yang berlaku seperti Peraturan Daerah, SK Gubernur dan Instruksi Gubenur yang mengatur tugas dan fungsi KAN di Minangkabau.
2. Agar pengurus KAN memahami dan mempelajari payung hukum yang berlaku untuk KAN dalam penyelesaian perkara perkara adat adat agar setiap keputusan yang diambil oleh KAN dalam Surat Keputusannya tidak merugikan Masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.Siti Soetami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdullah Gofar, 2014, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Badriyah Khaleed, 2016, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Darda Syahrizal, 2013, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Media Pressindo, Makassar.
- Datoek Toeh, 2010, *Tambo Alam Minangkabau*, CV. Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
- Dewi C Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dian Aries, 2017, *Mujburrahman. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta
- Edison dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Jimly Asshiddiqie dalam Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Musyair Zainuddin, 2011, *Membangkit Batang Tarandam: Adat Salingka Nagari Di Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sangadji, 2003, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Tampubolon, 2023, Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara. Get Press Indonesia, Padang.

Yuslim, 2016, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Kerapatan Adat Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 327 K/TUN/1996

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Putusan TUN Nomor 12/G/1995/PTUN.PDG

C. SUMBER LAIN

4 Peranan Urang Ampek Jinih (Orang Empat Jenis) di Minangkabau <https://infosumbar.net/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

Fungsi dan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) <https://123dok.com/> diakses pada tanggal 18 oktober 2023.

KAN (Kerapatan Adat Nagari) <http://nagari3kotoamal.id/> diakses pada tanggal 18 oktober 2023

Kedudukan dan Peranan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pada Pemerintahan Desa di Sumatera Barat <https://etd.repository.ugm.ac.id/> diakses pada tanggal 16 oktober 2023

Kekuasaan Legislatif Adalah: Pengertian dan Fungsi Lembaganya <https://www.gramedia.com/> diakses pada tanggal 29 oktober 2023

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, <https://ptun-jakarta.go.id>, diakses pada tanggal 6 november 2023

Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia & Contohnya <https://tirto.id> diakses pada tanggal 15 oktober 2023.

Menteri Pertanian RI Berkunjung Ke Salodako <https://nagariguguk.wordpress.com/> diakses pada tanggal 18 oktober 2023

Pengertian Kekuasaan Eksekutif (Pemerintah), Hak, Wewenang, Dan Tugasnya <https://belajargiat.id/> diakses pada tanggal 15 oktober 2023.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum <https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 16 oktober 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 <https://nagariguguk.wordpress.com/> diakses pada tanggal 18 oktober 2023

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara <https://www.rifaihadi.com/> diakses pada tanggal 18 oktober 2023